

## DETERMINAN MAKROEKONOMI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN EKONOMI

Nicholas Chang, Philipo Boediono, Luky Patricia Widianingsih<sup>\*</sup>  
Universitas Ciputra

**Abstract:** *Economic inequality is one of the primary challenges in achieving sustainable development in Indonesia. The Gini ratio serves as a key measurement to assess the extent of economic disparity in the country. This ratio is influenced by various factors, including the Regional Minimum Wage (UMR), Human Development Index (HDI), formal employment, population, and local taxes. This study aims to analyze and evaluate the impact of the Regional Minimum Wage (UMR), Human Development Index (HDI), formal employment, population, and local taxes on the gini ratio in Indonesia. The research sample includes secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS), covering 38 provinces in Indonesia for the 2023–2024 period. The study employs multiple linear regression analysis with classical assumption tests to ensure the validity of the research model. The findings indicate that only the population variable has a significant positive effect on the gini ratio. The implication from this study emphasize the importance of optimizing regional taxation, enhancing the effectiveness of fiscal transfers, and developing redistribution policies and community empowerment programs to mitigate economic inequality.*

**Keywords:** *Gini Ratio, Regional Minimum Wage, Human Development Index, Population, Formal Employment, Local Taxes*

**Abstrak:** Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengukuran rasio gini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan yang dialami di Indonesia. Rasio tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel yaitu Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pekerjaan formal, populasi, dan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>\*</sup>Corresponding Author.  
e-mail: luky.patricia@ciputra.ac.id

menganalisis dan mengevaluasi pengaruh variabel Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pekerjaan formal, populasi, dan pajak daerah terhadap data rasio gini di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup 38 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2024. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel populasi yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap rasio gini. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pajak daerah, peningkatan efektivitas transfer fiskal, serta pengembangan kebijakan redistribusi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

**Kata kunci:** Rasio Gini, Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia, Populasi, Pekerjaan Formal, Pajak Daerah

## PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi telah menjadi isu yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Negara Tiongkok dan India telah berhasil menarik masyarakatnya keluar dari kemiskinan dan membuat pendapatan menengah meningkat (Hung, 2021). Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia menunjukkan pola ketimpangan ekonomi yang lebih kompleks. Penelitian Widjaja *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan yang signifikan antara wilayah yang berkembang dengan yang tertinggal terutama dalam mengakses sumber daya dan layanan dasar. Efek pandemi Covid-19 juga memberikan dampak buruk pada mereka yang berpendidikan rendah dan pekerja informal (Sun, 2024).

Ketimpangan yang terjadi dapat diukur dengan berbagai indikator salah satunya adalah rasio gini. Rasio tersebut memberikan gambaran mengenai derajat ketimpangan. Semakin mendekati 0, semakin merata distribusi pendapatan, dan sebaliknya (Irmatriyanti *et al.*, 2023). Apabila distribusi pendapatan merata maka, tingkat pengangguran akan berkurang dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Almasah & Sirait, 2024). Rasio gini juga dapat dipengaruhi oleh populasi di suatu daerah apabila tidak diperhatikan dengan baik. Menurut Fitriyani *et al.* (2024) populasi yang banyak dapat menyebabkan lebih banyak variasi dalam pendapatan yang

mengarah pada ketimpangan yang lebih tinggi. Kondisi krisis seperti pandemi Covid-19 juga dapat menyebabkan ketimpangan melebar sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun (Fitriyani *et al.*, 2024).

Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) menyatakan bahwa rasio gini nasional pada 2024 tercatat sebesar .379, dengan perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan (.399) dan pedesaan (.306). Ketimpangan ini juga mencerminkan perbedaan pendapatan antara kalangan kelompok atas dan kelompok bawah. Pembangunan infrastruktur di kota-kota tertentu yang lebih cepat dengan kota atau desa lainnya menyebabkan ketimpangan semakin tinggi (Suryantini *et al.*, 2022). Selain itu, penelitian (Saputri & Arif, 2023) juga mengungkapkan bahwa perbedaan disparitas yang tinggi antar daerah perkotaan dan pedesaan terjadi karena faktor angkatan kerja. Siklus ketidaksetaraan ini sulit dipatahkan akibat tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah (Zalfaa, 2022).



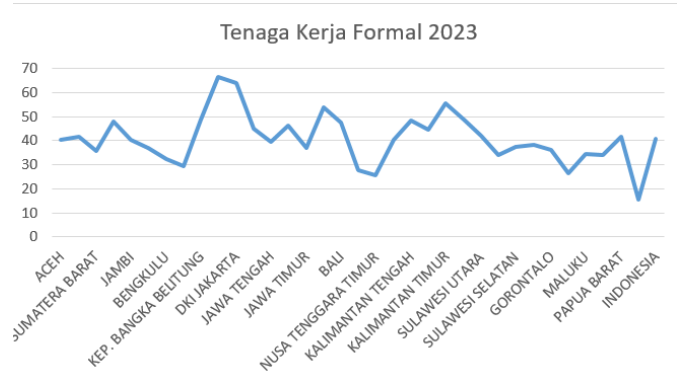
Gambar 1 Gini Ratio Kota dan Desa di Indonesia

Sumber: BPS (2024b)

Tingkat pendapatan berhubungan langsung dengan Upah Minimum Regional atau UMR. Penerapan UMR yang tepat tentu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Aqilah *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa UMR berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan melalui UMR dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan

meningkatkan daya beli pekerja. Penelitian Adriana (2024) justru menunjukkan bahwa peningkatan UMR yang terlalu ekstrem menimbulkan tingginya tingkat pengangguran sehingga memperparah ketimpangan pendapatan. Hal ini kembali dipertegas bahwa peningkatan UMR hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat dengan pekerjaan formal yang pendapatannya minimal sebesar UMR, sedangkan kelompok masyarakat dengan pekerjaan informal cenderung tidak memiliki pendapatan sebesar UMR sehingga tidak bergantung sama sekali dengan adanya kenaikan upah dan akhirnya berdampak pada rasio gini yang semakin meningkat (Khoiri *et al.*, 2020).

Merujuk pada gambar ke-2, Badan Pusat Indonesia (2023) mencatat bahwa sekitar 40.89% dari 100% masyarakat Indonesia lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja di sektor formal yang tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang berbeda-beda setiap orangnya. Salah satu alasan mengapa pekerjaan sektor formal sangat diminati oleh penduduk Indonesia adalah nominal gaji yang selalu sama dan mengikuti kebijakan UMR pemerintah sehingga berdampak pada indeks gini di Indonesia (Setiawan, 2019).

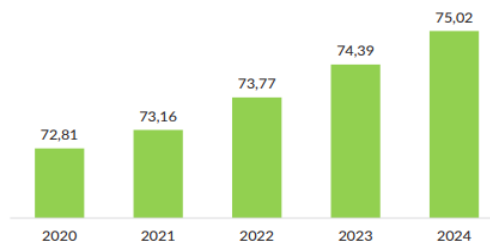


Gambar 2 Tenaga Formal 2024 di Indonesia  
Sumber: BPS (2023c)

Upah yang didapatkan pekerja formal tentu berdampak positif terhadap produktivitas dan perkembangan ekonomi (Nopiah *et al.*, 2024). Namun, sektor informal tetap mengalami kendala dalam mendapatkan akses terhadap UMR sehingga pekerja informal tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka (Wandaweka & Purwanti, 2021). Penelitian Hutahaeen & Sitorus

(2022) mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi dalam sektor formal dapat mengurangi rasio gini. Saputri & Arif (2023) juga menegaskan bahwa angkatan kerja mempengaruhi ketimpangan pendapatan terutama di wilayah perkotaan. Akan tetapi, menurut Winarto *et al.* (2024) bila pertumbuhan sektor formal tidak diimbangi dengan pendidikan maka rasio gini cenderung mengalami peningkatan.

Penelitian Li *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan menciptakan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Faktor pendidikan tersebut merupakan salah satu indikator yang berada di dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dwitayanti *et al.*, 2024). Dengan kata lain, IPM dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan yang dinilai melalui rasio gini. Indeks Pembangunan Manusia adalah alat atau indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Badan Pusat Statistik (2024) mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 mencapai hingga 75.02, meningkat sebesar 63% atau 85% persen jika dibandingkan dengan tahun 2023. Gambar 3 menunjukkan IPM mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya akibat adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 3 Pertumbuhan IPM di Indonesia

Sumber: BPS (2024a)

Merujuk pada Gambar 1 dan 3, peningkatan IPM di 5 tahun terakhir disertai dengan penurunan rasio gini di tahun yang sama. Penurunan rasio gini terbesar berada di tahun 2024 dengan selisih .007 dari tahun sebelumnya sedangkan peningkatan IPM terbesar juga berada di tahun 2024 dengan selisih .63 dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, IPM dapat mempengaruhi nilai rasio gini di Indonesia melalui tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Penelitian Sihombing *et al.* (2023) mengungkapkan

bahwa faktor pendidikan yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan. Walaupun IPM berpengaruh positif, ketimpangan pendapatan tetap ada karena harus diimbangi oleh kebijakan redistribusi yang tepat (Aisyah *et al.*, 2023) sehingga kontribusi pemerintah Indonesia dalam menurunkan rasio gini sangat diperlukan.

Pajak daerah merupakan kontribusi pemerintah yang berdampak langsung pada ketimpangan pendapatan. Manajemen fiskal yang baik memiliki potensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan meredakan kesenjangan di Indonesia (Wibowo *et al.*, 2022). Menurut Hanipah *et al.* (2023) pengeluaran pemerintah yang ditujukan kepada infrastruktur dan program sosial dapat menurunkan rasio gini. Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Alamanda (2021), infrastruktur yang disediakan pemerintah melalui APBN demi menunjang pelayanan kesehatan, dan pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang artinya mengurangi ketimpangan tersebut (Alamanda, 2021). Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan yang kurang merata dapat ditekan oleh pemerintah agar tercapai efisiensi sosial yang diinginkan (Ariani, 2023). Istan (2022) menegaskan kembali bahwa pengeluaran fiskal yang terarah dapat mendorong peluang kerja dan meningkatkan pendapatan nasional sehingga berpotensi mengurangi ketimpangan. Ketika pemerintah mampu memaksimalkan dan mengelola pajak secara tepat maka, layanan publik akan semakin efisien dan tentunya mendukung pengurangan ketidaksetaraan sehingga pendapatan masyarakat bisa lebih seimbang.

Banyak studi sebelumnya hanya berfokus pada salah satu variabel yang dapat mempengaruhi rasio gini namun, belum ada kajian komprehensif yang menggabungkan seluruh variabel tersebut dalam konteks Indonesia. Variabel pajak daerah dan populasi juga relatif terlupakan padahal kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, pekerjaan formal, populasi, dan pajak daerah terhadap rasio gini di ruang lingkup Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkapkan variabel yang paling berpengaruh terhadap rasio gini untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Determinan makroekonomi dalam judul adalah upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, pekerjaan formal, dan populasi.

## LANDASAN TEORI

### Rasio Gini

Rasio gini atau *gini ratio* sangat erat hubungannya dengan ketimpangan ekonomi. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan itu sendiri. Rasio gini dapat bernilai 0 hingga 1, nilai 0 atau *perfectly equal* mengungkapkan bahwa adanya kesetaraan sempurna atau setiap orang di daerah tertentu memiliki pendapatan yang sama sedangkan nilai 1 atau *complete inequality* menyatakan bahwa adanya ketimpangan sempurna dimana satu individu atau kelompok memiliki semua pendapatan pada lokasi tertentu (Fadhilah *et al.*, 2023). Rasio gini yang tinggi menyebabkan semakin tinggi pula distribusi pendapatan penduduk di lokasi tertentu (Rosa, 2016).

Kemampuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan ekonomi merupakan manfaat dari rasio gini. Selain itu, rasio gini juga dapat melakukan analisis untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan dalam menurunkan ketimpangan (Zalfaa, 2022). Penggunaan rasio berfungsi untuk membantu menganalisis data panel agar dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Indonesia (Suryantini *et al.*, 2022).

### Perumusan Hipotesis

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menentukan kemajuan suatu negara melalui aspek manusia yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita yang juga berkontribusi pada analisis ketimpangan sosial termasuk rasio gini (Mutiar, 2023). Investasi dalam faktor-faktor tersebut akan meningkatkan kualitas hidup seseorang dan memberikan dampak positif secara keseluruhan sehingga mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. IPM juga dapat digunakan sebagai indikator yang berfungsi untuk membandingkan tingkat pembangunan antar daerah demi merancang program-program daerah yang lebih tepat sasaran (Harlan, 2023).

Irmatriyanti *et al.* (2023) menegaskan bahwa peningkatan IPM berkorelasi negatif terhadap rasio gini artinya, perbaikan aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita dapat membantu menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jadi, hipotesis pertama adalah:

H1: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif pada rasio gini

Upah Minimum Regional adalah suatu peraturan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan pebisnis demi mengatur pemberian gaji di sektor usahanya masing-masing. Dengan kata lain, UMR merupakan indikator penting untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah serta mendorong daya beli masyarakat (Wahyuni & Utami, 2024). Penetapan UMR yang sesuai dapat meningkatkan konsumsi sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu fungsi UMR adalah mengurangi ketimpangan dengan memberikan standar minimum pendapatan bagi seluruh pekerja di sektor formal (Fitriyani *et al.*, 2024). UMR juga turut andil dalam stabilitas ekonomi sehingga ketika UMR ditetapkan, diharapkan UMR dapat mengurangi nilai rasio gini untuk mencerminkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Wijayanti & Putri (2023) yang menyatakan bahwa UMR memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan terutama di Pulau Jawa. Jadi, hipotesis kedua adalah:

H2: Peningkatan UMR berpengaruh negatif pada rasio gini

Pertumbuhan populasi merupakan fenomena kompleks yang terjadi karena berbagai pengaruh. Pertumbuhan ini harus dikelola dengan baik demi mendorong pertumbuhan ekonomi (Wicaksono, 2022). Apabila kebijakan tersebut gagal, kesenjangan pendapatan akan meningkat dan mobilitas ekonomi menjadi terhambat sehingga masyarakat hidup di lingkaran kemiskinan yang sulit diputus (Siregar & Rasyid, 2022). Dengan kata lain, semakin banyak populasi maka, ketimpangan pendapatan akan semakin besar. Maka dari itu, pengelolaan populasi harus dilakukan agar tidak memperburuk ketimpangan yang ada. Jadi, hipotesis keempat adalah:

H3: Populasi berpengaruh positif terhadap rasio gini

Sektor pekerjaan dapat dibagi menjadi dua yaitu sektor formal serta informal. Sektor pekerja formal adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bawah instansi berwenang dan memiliki aturan serta regulasi yang jelas (Octaviani, 2022). Penelitian kali ini lebih berfokus kepada pengaruh pekerja formal terhadap rasio gini. Menurut Fitriyani *et al.* (2024) pekerja sektor formal berkontribusi negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena pekerja formal memiliki upah yang stabil, diatur oleh hukum, dan memiliki jaminan sosial. Jadi, hipotesis ketiga adalah:

H4: Pekerjaan Formal berpengaruh negatif terhadap rasio gini

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang salah satunya dimanfaatkan untuk pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur (Fahmi, 2019). Pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi anggaran, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas ekonomi (Gobel, 2023). Penerimaan pajak tidak hanya mendukung kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa layanan publik yang tersedia dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat (Fitri *et al.*, 2024).

Pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak daerah merupakan kontributor penting terhadap pendapatan daerah. Apabila pendapatan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengurangi nilai rasio gini. Penelitian Rosyadi (2024) menyimpulkan bahwa pajak daerah yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membantu penduduk kurang mampu. Dengan kata lain, alokasi pendapatan dari pajak daerah memberikan dampak positif terhadap distribusi pendapatan secara keseluruhan. Jadi, hipotesis kelima adalah:

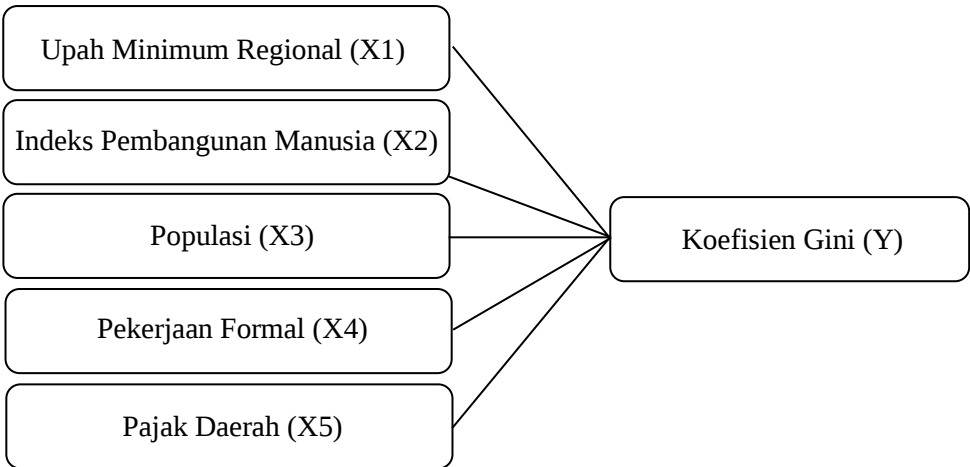
H5: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap rasio gini

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam ranah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari BPS (2023) dan BPS (2024), dengan menggunakan data statistik 38 provinsi di Indonesia sebagai data yang digunakan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, metode analisis

data yang digunakan adalah uji asumsi klasik diantaranya: uji asumsi klasik, uji *r square*, uji F, dan uji T yang ditujukan untuk memperoleh asumsi dasar seperti linearitas hubungan, normalitas *residual*, heteroskedastisitas, tidak adanya multikolinearitas, dan tidak adanya autokorelasi. Apabila sudah melalui uji asumsi klasik maka akan dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda, dengan melalui beberapa prosedur sebelumnya. Yusuf *et al.*, (2024) menegaskan bahwa regresi linier berganda adalah metode untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen (Y) dan beberapa variabel independen (X1, X2, X3, X4, dan X5), dimana X1 merupakan indeks pembangunan manusia, X2 adalah upah minimum regional, X3 mewakili populasi, X4 adalah pekerjaan formal, dan X5 adalah pajak daerah. Model matematis terkait regresi linier tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Koefisien Gini} = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon$$



Gambar 4 Kerangka Konseptual

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

| Variabel           | N  | Minimum    | Maximum    | Mean        | Std. Deviation |
|--------------------|----|------------|------------|-------------|----------------|
| X1                 | 38 | 53.42      | 83.08      | 72.3884     | 5.15023        |
| X2                 | 38 | 2036947.00 | 5067381.00 | 3113359,849 | 641781.7331    |
| X3                 | 34 | 739.80     | 50345.20   | 8282.4676   | 11703.08871    |
| X4                 | 34 | 15.57      | 66.33      | 40.6479     | 10.40941       |
| X5                 | 38 | 1.01E+12   | 7.10E+13   | 9.442E+12   | 1.29767E+13    |
| Y                  | 38 | .24        | .44        | .3411       | .04560         |
| Valid N (listwise) | 34 |            |            |             |                |

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Martias (2021) menjelaskan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil dari observasi yang dilakukan, yang mencakup rata-rata, median, dan modus dari data yang diamati. Sebagaimana pada Tabel 1, dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antar-provinsi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata 72.39 dengan standar deviasi 5.15, di mana Papua Barat Daya memiliki IPM terendah (53.42) dan DKI Jakarta tertinggi (83.08). Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan disparitas tinggi dengan rata-rata Rp3.11 juta dan standar deviasi Rp 641 ribu; Jawa Tengah memiliki UMR terendah (Rp2.04 juta) sementara DKI Jakarta tertinggi (Rp5.07 juta).

Populasi antar-provinsi sangat timpang dengan rata-rata 8.28 juta dan standar deviasi 11.7 juta; Kalimantan Tengah memiliki populasi terendah (739.8 ribu), sementara Jawa Barat tertinggi (50.3 juta). Persentase pekerja formal rata-rata 40.65% dengan standar deviasi 10.41%; Papua memiliki angka terendah (15.57%), sedangkan DKI Jakarta tertinggi (66.33%). Pendapatan daerah menunjukkan kesenjangan ekonomi ekstrem dengan rata-rata Rp9.44 triliun dan standar deviasi Rp 12.97 triliun; Papua Selatan

memiliki pendapatan daerah terendah (Rp1.01 triliun), sedangkan DKI Jakarta tertinggi (Rp71.0 triliun). Koefisien gini, sebagai indikator ketimpangan, memiliki rata-rata .3411 dengan standar deviasi .0456, relatif lebih merata dibanding variabel lainnya. Bangka Belitung memiliki ketimpangan terendah (.24), sementara DI. Yogyakarta tertinggi (.44). Selain itu, perbedaan jumlah observasi pada beberapa variabel menunjukkan adanya *missing data* yang perlu diperhatikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diawali oleh uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang berfungsi untuk menentukan apakah *error* dalam suatu penelitian telah terdistribusi dengan baik. Distribusi *error* tersebut sangat berpengaruh dalam metode statistik yang akan digunakan sehingga pengujian normalitas membantu memastikan bahwa analisis yang dilakukan sudah relevan dan akurat.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas  
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                     |                | Unstandardized Residual |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                   |                | 34                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>    | Mean           | .0000000                |
|                                     | Std. Deviation | .03846724               |
| Most Extreme Differences            | Absolute       | .079                    |
|                                     | Positive       | .079                    |
|                                     | Negative       | -.075                   |
| Test Statistic                      |                | .079                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup> |                | .200 <sup>d</sup>       |
| a. Test distribution is Normal.     |                |                         |
| b. Calculated from data.            |                |                         |
| c. Lilliefors Significance          |                |                         |

Correction.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Pratama & Permatasari (2021) menyebutkan bahwa untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal, digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, di mana jika nilai signifikansi kurang dari .05 menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Terlihat pada Tabel 2, uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan data variabel *residual* dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) > .05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data diatas telah terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas juga wajib dilaksanakan guna memastikan tidak adanya hubungan linier yang sangat kuat antara variabel independen. Apabila multikolinearitas terjadi maka, hasil regresi dapat menyebabkan bias, dan interpretasi koefisien regresi menjadi tidak valid sedangkan, model regresi yang baik tidak akan menunjukkan korelasi antar variabel independen.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

| Model        | Unstandardized |            | Standardized |        | t    | Sig. | Collinearity |       |
|--------------|----------------|------------|--------------|--------|------|------|--------------|-------|
|              | Coefficients   |            | Coefficients |        |      |      | Statistics   |       |
|              | B              | Std. Error | Beta         |        |      |      | Tolerance    | VIF   |
| 1 (Constant) | .167           | .214       |              |        | .778 | .443 |              |       |
| X1           | .003           | .003       | .197         | .795   | .433 |      | .372         | 2.687 |
| X2           | 2.858E-9       | .000       | .038         | .200   | .843 |      | .636         | 1.573 |
| X3           | 1.806E-6       | .000       | .457         | 2.426  | .022 |      | .640         | 1.562 |
| X4           | -.001          | .001       | -.297        | -1.263 | .217 |      | .411         | 2.434 |
| X5           | 9.861E-16      | .000       | .287         | 1.566  | .129 |      | .677         | 1.478 |

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Jusmansyah (2020) menjelaskan bahwa untuk mengevaluasi multikolinearitas, digunakan nilai VIF dan *tolerance*. Jika nilai VIF berada di atas 10 atau nilai *tolerance* kurang dari .1, ini menunjukkan adanya masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, diperoleh nilai *tolerance* X1 menunjukkan hasil .372 yang diikuti oleh variabel X2 senilai .636, variabel X3 senilai .640, variabel X4 senilai .411, dan variabel X5 senilai

.677. Tidak ada satu pun variabel yang menunjukkan hasil *tolerance*  $\leq .1$  sehingga seluruh variabel di atas tidak menunjukkan multikolinearitas.

Selain itu, berdasarkan kriteria interpretasi, nilai VIF yang berada di bawah ambang batas 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang signifikan di antara variabel-variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil analisis regresi tidak bias akibat variasi *residual* yang tidak seragam. Proses pengujian ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan uji glejser.

Tabel 4 Hasil Uji Glejser

|       |            | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                                  |       |      |
|-------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|-------|------|
| Model |            | Unstandardized Coefficients | Std. Error | Standardized Coefficients (Beta) | t     | Sig. |
| 1     | (Constant) | .11                         | .128       |                                  | .856  | .399 |
|       | X1         | -.002                       | .002       | -.252                            | -.864 | .395 |
|       | X2         | 3.85E-09                    | 0          | .101                             | .451  | .656 |
|       | X3         | 1.39E-08                    | 0          | .007                             | .031  | .975 |
|       | X4         | .001                        | .001       | .374                             | 1.346 | .189 |
|       | X5         | -3.722E-16                  | 0          | -.213                            | -.986 | .333 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES  
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan melihat hubungan antara nilai *residual absolute* (ABS\_RES) dan variabel independen. Iskandar & Arief (2022) menekankan bahwa jika nilai signifikansi (Sig.) untuk semua variabel independen lebih besar dari .05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis hasil uji glejser pada Tabel 4, variabel indeks pembangunan manusia (X1) memiliki nilai signifikansi .395, upah minimum rata-rata (X2) sebesar .656, populasi (X3) sebesar .975, persentase pekerja formal (X4) sebesar .189, dan pajak daerah (X5) sebesar .333. Karena seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari .05, dapat dinyatakan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas

dan memenuhi asumsi non-heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi adalah kondisi di mana *residual* atau *error* dalam model regresi memiliki pola yang berulang atau berkorelasi satu sama lain, yang dapat mengganggu validitas model. Pada penelitian ini, digunakan uji Durbin Watson untuk memastikan tidak terjadi Autokorelasi pada penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Durbin Watson

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .603 <sup>a</sup> | .363     | .249              | .04004                     | 2.082         |

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Maitridani *et al.* (2023) menyatakan bahwa Uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dalam deret waktu. Statistik DW dapat berkisar antara 0 dan 4, dengan nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 5, menggunakan statistik Durbin-Watson (DW), nilai DW yang diperoleh adalah 2.082. Nilai ini berada di atas angka 2, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, baik positif maupun negatif, dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi asumsi bebas autokorelasi.

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi linier. Nilai R<sup>2</sup> berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik model tersebut dalam menggambarkan variabilitas data. Sebagai ilustrasi, jika R<sup>2</sup> = .75, berarti 75% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model tersebut (Sehangunaung *et al.*, 2023).

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .603 <sup>a</sup> | .363     | .249              | .04004                     |

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Hasil analisis Uji Koefisien Determinasi pada Tabel 6 menunjukkan nilai R sebesar .603, yang mengindikasikan hubungan positif sedang antara variabel independen dan dependen. Nilai *R Square* sebesar .363 berarti 36.3% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan *Standard Error of the Estimate* sebesar .4004, model ini memiliki tingkat kesalahan prediksi yang sedang.

Uji F

Uji F adalah metode statistik untuk mengevaluasi signifikansi keseluruhan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa semua koefisien regresi variabel independen sama dengan nol ( $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ ), sedangkan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) menyatakan setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol ( $\beta \neq 0$ ). (Yusuf *et al.*, 2024). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha/\alpha$  *pha*) .05, di mana nilai F dihitung dari perbandingan *Mean Square Regression* dan *Mean Square Residual*. Jika *p-value* < .05,  $H_0$  ditolak, menunjukkan model signifikan dan variabel independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *p-value*  $\geq$  .05, model dianggap tidak signifikan dan perlu evaluasi lebih lanjut.

Tabel 7 Hasil Uji F

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |       |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                  | Regression | .026           | 5  | .005        | 3.192 | .021 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | .045           | 28 | .002        |       |                   |
|                    | Total      | .070           | 33 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Uji ANOVA digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Signifikansi model dapat dilihat dari nilai F dan nilai Signifikansi (Sig.). Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada Tabel 7, diperoleh informasi mengenai *Sum of Squares* yang terdiri dari *Regression* sebesar .026 yang menunjukkan variansi yang dijelaskan oleh model regresi, *Residual* sebesar .045 yang menggambarkan variansi yang tidak dijelaskan oleh model (*error*), dan Total sebesar .070 yang merepresentasikan total variansi dari variabel dependen.

Dari segi *Degree of Freedom* (df), model memiliki 5 df untuk Regresi yang sesuai dengan jumlah variabel independen, 28 df untuk *Residual* yang merupakan hasil dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen ditambah 1, dan 33 df untuk Total yang menunjukkan jumlah total sampel dikurangi 1. *Mean Square* untuk *Regression* sebesar .005 menunjukkan nilai rata-rata dari variansi yang dijelaskan oleh model, sementara *Mean Square Residual* sebesar .002 menggambarkan nilai rata-rata dari variansi *error*. Hasil analisis menunjukkan nilai F sebesar 3.192 yang merupakan rasio antara *Mean Square Regression* dan *Mean Square Residual*, mengindikasikan seberapa baik model regresi menjelaskan variansi dibandingkan dengan *error*. Nilai Signifikansi sebesar .021 yang lebih kecil dari .05 menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan ( $p = .021 < .05$ ), yang mengindikasikan bahwa setidaknya terdapat satu variabel independen yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai F sebesar 3.192 juga menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan variansi dibandingkan dengan *error*.

Uji T

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh individu setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam regresi. Jika *p-value* < .05,  $H_0$  ditolak, menandakan variabel independen berpengaruh signifikan, sedangkan jika *p-value*  $\geq .05$ , pengaruhnya tidak signifikan (Yusuf *et al.*, 2024).

Tabel 8 Hasil Uji T

|   | Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|---|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|   |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 | (Constant) | .167                        | .214       |                           | .778   | .443 |                         |       |
|   | X1         | .003                        | .003       | .197                      | .795   | .433 | .372                    | 2.687 |
|   | X2         | 2.858E-9                    | .000       | .038                      | .200   | .843 | .636                    | 1.573 |
|   | X3         | 1.806E-6                    | .000       | .457                      | 2.426  | .022 | .640                    | 1.562 |
|   | X4         | -.001                       | .001       | -.297                     | -1.263 | .217 | .411                    | 2.434 |
|   | X5         | 9.861E-16                   | .000       | .287                      | 1.566  | .129 | .677                    | 1.478 |

a. Dependent Variable: Y  
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

*Unstandardized Coefficients* (B) merepresentasikan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dalam satuan asli, *Standardized Coefficients* (Beta) digunakan untuk membandingkan pengaruh antar variabel independen dengan satuan yang telah di standarisasi, sedangkan *t-value* dan Signifikansi (Sig.) mengukur signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dimana nilai *p-value* (Sig.) < .05 menunjukkan

pengaruh yang signifikan.

Sebagaimana dalam Tabel 8, variabel X1 (IPM per Provinsi) menunjukkan koefisien positif ( $B = .003$ ) dengan Beta  $.197$ , yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit IPM meningkatkan variabel dependen sebesar  $.003$ , meskipun pengaruh ini tidak signifikan ( $t = .795$ ,  $p = .433$ ). Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis awal (H1) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh secara negatif terhadap koefisien gini, IPM justru memberikan pengaruh positif meskipun tidak signifikan. Sementara itu, variabel X2 (UMR per Provinsi) memiliki koefisien yang sangat kecil ( $B = 2.858E-9$ ) dan Beta  $.038$ , mengindikasikan pengaruh positif lemah yang tidak signifikan ( $t = .200$ ,  $p = .843$ ). Temuan ini mematahkan hipotesis awal (H2), dimana UMR justru berpengaruh secara positif terhadap koefisien gini.

Berbeda dengan kedua variabel tersebut, variabel X3 (Populasi per Provinsi) menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan koefisien  $B = 1.806E-6$ , Beta  $.457$ ,  $t = 2.426$ , dan signifikansi  $.022$  ( $p < .05$ ). Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal (H3) bahwa populasi berpengaruh secara positif terhadap koefisien gini. Sedangkan, variabel X4 (Persentase Pekerja Formal per Provinsi) memiliki koefisien negatif ( $B = -.001$ ) dengan Beta  $-.297$ , menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pekerja formal menurunkan variabel dependen sebesar  $.001$ , namun pengaruhnya tidak signifikan ( $t = -1.263$ ,  $p = .217$ ). Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal (H4) bahwa persentase pekerja formal berpengaruh secara negatif terhadap koefisien gini. Terakhir, variabel X5 (Total Realisasi Pendapatan Daerah per Provinsi) memiliki koefisien positif kecil ( $B = 9.861E-6$ ) dengan Beta  $.287$ , yang menunjukkan pengaruh positif sedang meskipun tidak signifikan ( $t = 1.566$ ,  $p = .129$ ). Temuan ini sejalan dengan hipotesis awal (H5) bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap koefisien gini.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Populasi per Provinsi (X3) merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan koefisien regresi sebesar  $.000001806$ , nilai  $t$  sebesar  $2.426$ , dan signifikansi  $.022$  ( $< .05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 juta penduduk akan meningkatkan variabel dependen sebesar  $1.806$  unit, ini sesuai dengan Hipotesis awal (H4) bahwa populasi berpengaruh secara positif terhadap

ketimpangan ekonomi. Faktor ini berpengaruh karena populasi yang besar meningkatkan ukuran pasar, daya beli masyarakat, serta aktivitas ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh provinsi dengan populasi tinggi seperti Jawa Barat (50.3 juta jiwa) yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan provinsi dengan populasi rendah seperti Maluku (1.9 juta jiwa). Selain itu, nilai Beta X3 sebesar .457, yang merupakan yang tertinggi dalam model, menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh terbesar dibandingkan variabel lain dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Sebaliknya, variabel IPM (X1), UMR (X2), Persentase Pekerja Formal (X4), dan Total Pendapatan Daerah (X5) tidak berpengaruh signifikan. Meskipun secara teori faktor-faktor ini dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi, hasil regresi menunjukkan *p-value* di atas .05, menandakan bahwa pengaruhnya terhadap variabel dependen tidak cukup kuat. Misalnya, IPM memiliki koefisien sangat kecil ( $B = .003$ ,  $p = .433$ ), menunjukkan bahwa meskipun kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat, hal ini belum tentu berdampak langsung pada variabel dependen. Begitu pula dengan UMR ( $B = 2.858E-9$ ,  $p = .843$ ), yang tidak berpengaruh signifikan karena biaya hidup antar provinsi yang berbeda. Demikian pula, pekerja formal dan pendapatan daerah tidak menunjukkan hubungan signifikan, yang mengindikasikan bahwa faktor seperti distribusi pekerjaan dan efektivitas APBD mungkin lebih berpengaruh terhadap koefisien gini dibandingkan jumlah nominal pendapatan daerah.

Penelitian ini cukup sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan *et al.* (2024) mengenai analisa pengaruh populasi terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi pada provinsi Nusa Tenggara pada tahun 2019-2023 dalam hal dampak terhadap koefisien gini. Dimana Irawan *et al.* (2024) menyatakan bahwa ketimpangan yang terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak lepas dari faktor populasi. Populasi atau jumlah penduduk menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang terjadi, peningkatan populasi artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan dan lapangan pekerjaan. Namun, dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan temuan kami, dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan *et al.* (2024), dampak populasi terhadap koefisien gini tidak signifikan. Sedangkan dalam temuan kami, populasi memiliki signifikansi yang besar terhadap ketimpangan ekonomi dengan nilai signifikansi .022, dibawah alpha (.05) yang membuktikan bahwa

populasi memiliki signifikansi yang tinggi terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor populasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara variabel lain seperti upah minimum regional (UMR), indeks pembangunan manusia (IPM), dan pajak daerah belum menunjukkan dampak yang berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa persebaran penduduk yang tidak merata, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi salah satu pemicu utama ketimpangan ekonomi. Daerah dengan populasi tinggi cenderung memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi dan infrastruktur, sementara daerah dengan populasi lebih sedikit seringkali tertinggal dalam aspek pembangunan.

Perbedaan kesejahteraan antar wilayah juga semakin diperparah oleh ketimpangan dalam UMR dan kapasitas fiskal daerah. Wilayah dengan UMR tinggi seperti DKI Jakarta cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan UMR rendah seperti Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah yang lebih tinggi tidak selalu berarti kesenjangan yang lebih besar, tetapi justru dapat berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki pemerataan ekonomi. Namun, jika kenaikan UMR tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan kebijakan redistribusi yang efektif, maka ketimpangan ekonomi justru bisa semakin melebar.

Implikasi dari temuan ini cukup luas, terutama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Pemerintah perlu menyesuaikan strategi pemerataan ekonomi dengan mempertimbangkan faktor populasi dan distribusi infrastruktur. Upaya redistribusi ekonomi, seperti optimalisasi pajak daerah dan transfer fiskal, harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing wilayah dengan ketimpangan tinggi. Selain itu, peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal dan terpencil akan membantu memperbaiki aspek pengetahuan dan kecerdasan, dan menciptakan peluang

ekonomi yang lebih merata.

Ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi, dan pertumbuhan jangka panjang. Jika kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tidak segera ditangani, maka ketidakpuasan sosial dan kesenjangan akses terhadap sumber daya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan nyata sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara efektif dan berkelanjutan.

### **Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Dari segi data, jumlah observasi yang terbatas dan adanya beberapa data yang hilang bisa mempengaruhi hasil analisis. Model yang digunakan juga masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, dengan nilai  $R^2$  sebesar .363. Hal lain yang perlu dicatat adalah pendekatan penelitian yang hanya fokus pada analisis kuantitatif, tanpa melibatkan analisis kualitatif yang bisa memberikan pemahaman lebih dalam. Kurangnya kontrol terhadap variabel eksternal juga bisa membuat hasil penelitian ini kurang akurat.

Untuk penelitian selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar hasilnya lebih mendekati sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan panel data agar bisa melihat bagaimana ketimpangan ekonomi berubah seiring waktu. Menambahkan variabel seperti PDRB, infrastruktur, dan faktor sosial juga bisa membantu analisis menjadi lebih lengkap. Selain itu, menggabungkan metode kualitatif dan analisis spasial bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang penyebab ketimpangan ekonomi di berbagai daerah.

Dari sisi kebijakan, penting untuk mengembangkan strategi yang lebih fokus pada faktor populasi, terutama di daerah dengan jumlah penduduk tinggi. Pemerataan distribusi penduduk dan optimalisasi bonus demografi bisa menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya lebih dalam mengoptimalkan pajak daerah, meningkatkan efektivitas transfer fiskal, dan memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas.

Pemerataan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adriana, M. (2024). Determinasi Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2010-2020). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 805-818. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.17448>.
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722-3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>.
- Alamanda, A. (2021). The Effect Of Economic Growth On Income Inequality: Panel Data Analysis From Fifty Countries.
- Almasah, M. Z. And Sirait, T. (2024). Analisis Ekonomi Sosial Dan Indeks Inklusi Keuangan Di Indonesia Dengan Persamaan Bentuk Tereduksi. *Limits: Journal Of Mathematics And Its Applications*, 21(1), 81. <https://doi.org/10.12962/limits.v21i1.17113>.
- Aqilah, M. R. A., Muchtar, M., Sihombing, P. R. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 4(1), 13-24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.684>.
- Ariani. (2023). Distribusi Pendapatan. *Pengantar Ilmu Ekonomi Badung*, Bali.
- BPS. (2024a). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024. Diakses Pada 27 November 2024.
- BPS. (2024b). Gini Rasio Kota Dan Desa Di Indonesia Tahun 2024. Diakses Pada 27 November 2024.
- BPS. (2024c). Tenaga Formal Tahun 2023 Di Indonesia. Diakses Pada 27 November 2024.
- Dwitayanti, Y., Robiani, B., Mukhlis, M., Rohima, S. (2024). Determinan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 184-200. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5578>.
- Fadhilah, M. H., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Pendidikan Terhadap

- Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4782>.
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan PBB Terhadap Kesenjangan Pendapatan, 6(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>.
- Fitriyani, C., Rusiti, R., Septiavin, Q., Sari, E. R. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 293-307. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.354>.
- Gobel, Y. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021. *Ekalaya*, 1(1), 10-21. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.36>.
- Hanipah, H., Sugiartini, P., Maula, I. M. (2023). Analysis Of The Impact Of Government Fiscal And Monetary Policies On Economic Growth In Indonesia: Government Economic Approach. *Journal Of Social Research*, 2(11), 3867-3871. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i11.1498>.
- Harlan, E. (2023). Bagaimana Konsumsi Tembakau, Ipm, Ketimpangan, Pendapatan Dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan Di Lampung?. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(2), 22. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i2.22007>.
- Hung, H. (2021). Recent Trends In Global Economic Inequality. *Annual Review Of Sociology*, 47(1), 349-367. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-090320-105810>.
- Irawan, D., Wijimulawiani, B. S., & Hak, M. B. U. (2024). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 623-633.
- Irmatriyanti, I., Windari, W., Havis, M., Asnidar, A., & Ridha, A. (2023). Pengaruh Ipm, Gini Rasio Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tpt Di Kabupaten Aceh Singkil. *Akuntansi*, 2(4), 262-278. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.1281>.
- Iskandar, M. F., Arief, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Uptd Instalasi Farmasi Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora (Eksishum)*, 2(1).
- Istan, M. (2022). The Role Of Fiscal Policy In Building Democracy And Overcoming Economic Recession In Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

- Manajemen, Ekonomi, & Amp; Akuntansi (Mea)*, 6(3), 1699-1712.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2625>.
- Jusmansyah, M. (2020). Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Dan Return On Equity Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 179-198.
- Li, T., Chen, Y., Xing, Z. (2023). The Reasons And Solutions For Economic Inequality In China. *Advances In Economics, Management And Political Sciences*, 43(1), 232-239. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/43/20232169>.
- Khoiri., A. Z., Pahlawan., E., R., Samara., F., H. (2020). Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Pendekatan Data Panel 2016-2020.
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40-59.
- Maitridani, T., Syafira, H., Yusuf, S. M., Nurdiansyah, R. P. (2023). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 6 Provinsi Di Pulau Jawa (2017-2021). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(09), 24-35.
- Mutiara, W. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Nias Barat. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 11-19.  
<https://doi.org/10.32938/jep.v5i1.3579>.
- Nopiah, R., Anggraini, E. D., Islami, P. A. (2024). Woman's Labor Participation And Household Welfare: An Empirical Study In Sumatera Island. *Jurnal Kawistara*, 14(1), 72.  
<https://doi.org/10.22146/kawistara.81011>.
- Oxfam. (2017). Menuju Indonesia Yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia.
- Pratama, S. A., Permatasari, R. I. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Divisi Ekspor PT. Dua Kuda Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 11(1).
- Rosa, Y., D., Sovita., I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Di Pulau Jawa, 2(4).
- Rosyadi, M. R. (2024). Determinan Penerimaan Pajak Daerah Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(2), 222-231. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.696>.

- Saputri, Y. G. Arif, M. (2023). Ketimpangan Wilayah Urban Di Provinsi Jawa Barat Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis Dan Manajemen)*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v7i1.2899>.
- Sehangunaung, G. A., Mandey, S. L., Roring, F. (2023). Analisis Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengguna Aplikasi Lazada Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 1-11.
- Setiawan, M., R. (2019). Analisis Faktor Resiko Stress Akibat Kerja Pada Pekerja Sektor Formal Dan Sektor Informal Di Kota Semarang.
- Sihombing, P. R., Sinarwati, N. K., Astawa, I. G. P. B. (2023). Korelasi Antar Variabel Makro Penentu Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 29-44. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.3772>.
- Siregar, S. I. Rasyid, F. A. A. (2022). Review Of Gini Ratio On Economic Growth With Human Mobility Mediation During Indonesia's Covid-19 Era. *AJIRSS: Asian Journal Of Innovative Research In Social Science*, 1(2), 57-67. <https://doi.org/10.53866/ajirss.v1i2.88>.
- Sun, X. (2024). The Impact Of Covid-19 Shocks On The U.S. Unemployment Rate. *Advances In Economics, Management And Political Sciences*, 121(1), 184-193. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/121/20242532>.
- Suryantini, N. P. S., Darmayanti, N. P. A., Wibawa, I. M. A., Gede, I. G. K. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Propinsi Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(1), 40-51. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i1.40-51>.
- Wahyuni, R. N. T. Utami, T. A. (2024). Pengaruh Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Dengan Akses Energi Sebagai Variabel Moderasi: Moderated Regression Analysis. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 1031-1040. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2122>.
- Wibowo, T., Siregar, H., Rustiadi, E., Hardiyanto, A. T. (2022). The Analysis Of Sub-National Fiscal Risk In Indonesia. *International Journal Of Sustainable Development And Planning*, 17(7), 2183-2188. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170718>.
- Wicaksono, B. B. (2022). Optimizing Economy Outcomes With Demography Bonuses. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(2), 56-68. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i2.29>.

- Widjaja, I., Tikson, D. T., Rahmadanih, R. (2022). Association Of Development Disparity, Economic Growth On Poverty In South Sulawesi Province. *The Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(3), 246-255. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i3.213>.
- Wijayanti, D. Putri, I. D. N. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 126-134. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art2>.
- Winarto, N. D., Nurjanah, S., Pratama, A. (2024). The Effect Of Economic Gini Ratio, Lecturer Ratio, And Number Of Universities Ratio On The Gross Enrollment Rate (Ger) Of Higher Education At Indonesia In 2020–2022. *International Journal Of Applied And Advanced Multidisciplinary Research*, 2(3), 185-200. <https://doi.org/10.59890/ijaamr.v2i3.1548>.
- Wandaweka, A. T. Purwanti, D. (2021). Determinan Partisipasi Kerja Perempuan Dalam Sektor Informal Di Indonesia Tahun 2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 652-661. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.994>.
- Hutahaean, Y. M. Sitorus, J. R. H. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Bekerja Di Pulau Jawa. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1165-1176. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1388>.
- Yusuf, M. A., Herman, T., Abraham, A., Rukmana, H. (2024). Analisis Regresi Linier Sederhana Dan Berganda Beserta Penerapannya. *Journal On Education*, 6(02), 13331-133344.
- Zalfaa, M. (2022). Pengaruh Rasio Gini Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel. *Concept: Journal Of Social Humanities And Education*, 1(4), 164-172. <https://doi.org/10.55606/concept.v1i4.100>.

